

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D. (2018). Analisis Kinerja Birokrasi Publik pada Dinas Sosial Kota Dumai, 13(April), 53–62.
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Makasar: Alfabeta
- Hadiyati, E. (2014). Service Quality and Performance of Public Sector: Study on Immigration Office in Indonesia. *International Journal of Marketing Studies*, 6(6), 104–117. <https://doi.org/10.5539/ijms.v6n6p104>
- Hutasoit, N. S. (2016). Kinerja pegawai negeri sipil pada kantor kecamatan palaran kota samarinda. *E-Journal Fisip*, 4(2), 3951–3961.
- <http://batampos.co.id>RumitnyaBPNbatam.
- Jaenudin, & Chairunisa, F. (2015). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. *Jurnal Administrasi Negara*, 21(2), 50–61.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong., H. (2014). *Teori Administrasi Publik* (2nd ed.). Bandung: CV. Alfabeta.
- Rahim, A., Ibrahim, M. A., & Yunus, M. (2017). Merit System Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Analisis*, 6(1), 92–99.
- Rahman, T. (2017). Kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. *Kinerja Aparatur*, 5(2), 661–672.
- Rindah. (2017). Analisis kinerja aparat sipil negara (asn) di dinas pendidikan dan kebudayaan daerah provinsi sulawesi tengah. -*Jurnal Katalogis*, 5(5), 109–119.
- Sembiring, M. (2012). *Budaya Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Fokusmedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (16th ed.). Bandung: CV. ALFABETA.

Peraturan Perundangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pembuatan Sertifikat Tanah
Pasal 1 Ayat (1).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Penadayagunan Aparatur
Negara.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.